



## Akuntabilitas dalam Perencanaan dan Pengelolaan dana yayasan Forum Silaturahmi Warga Muslim Lippo Cikarang (FORSIL WMLC)

Rijki Julian Bekti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Pelita Bangsa  
Email: rijkijulianbekti09@gmail.com

### ABSTRACT

*Planning is the process of making plans to achieve certain goals. This includes identifying the goals to be achieved, analyzing the current situation, and developing strategies to achieve those goals. Planning also includes allocating resources such as time, money, and energy to achieve desired goals. Planning aims to help individuals or organizations achieve desired results efficiently and effectively. Management is a process that provides oversight of all matters involved in implementing policies and achieving goals. This journal was created using descriptive qualitative research methods. Descriptive qualitative research is a problem formulation that guides research to explore or photograph the social situation that will be researched thoroughly, broadly and, in depth.*

**Keywords:** *Planning, Management, Foundation scope, FORSIL WMLC*

### ABSTRAK

Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ini mencakup mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai, menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga mencakup alokasi sumber daya seperti waktu, uang, dan energi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan bertujuan membantu individu atau organisasi mencapai hasil yang diinginkan secara efisien dan efektif. Manajemen adalah proses yang memberikan pengawasan atas semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Jurnal ini dibuat menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah perumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam.

**Keywords:** Perencanaan, Manajemen, Lingkup Yayasan, FORSIL WMLC

### 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, keberadaan Yayasan telah dikenal sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, yang dikenal dengan sebutan “Stichting”. Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan (Robi Krisna, 2021). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 pasal satu. Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang tersusun dari kekayaan baik harta maupun lainnya yang dipisahkan dan bertujuan untuk dapat mencapai sebuah tujuan tertentu dalam

beberapa bidang, seperti bidang sosial, bidang kemanusiaan, dan bidang keagamaan yang tidak memiliki anggota (Nandy 2021).

Yayasan bergerak dalam berbagai sektor seperti sektor pendidikan, agama, dan sosial atau kemanusiaan. Keberadaan yayasan juga tidak luput dari keinginan masyarakat untuk memiliki suatu wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yang dalam menjalankan roda kegiatannya dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat (Anwar Muhammad Chairul 2021).

Dikutip dari website [data.kemdikbud.go.id](http://data.kemdikbud.go.id) terdapat 1.661 yayasan aktif di kabupaten Bekasi. Salah satunya adalah Yayasan Forum Silaturahmi Warga Muslim Lippo Cikarang (FORSIL WMLC). Dikutip dari website FORSIL WMLC bahwa Yayasan Forum Silaturahmi Warga Muslim Lippo Cikarang (FORSIL WMLC) adalah organisasi nonprofit berbasis keagamaan yang bertujuan untuk memperkuat *ukhuwah Islamiyah* antar warga muslim di kawasan lippo cikarang. Selain menjadi sarana untuk memperkuat silaturahmi antar warga muslim di kawasan lippo cikarang, yayasan FORSIL WMLC didirikan karena kekhawatiran warga terkait lemahnya hubungan warga muslim di kawasan lippo yang di dalamnya termasuk minoritas. Yayasan FORSIL WMLC juga banyak melakukan berbagai kegiatan diantaranya, pelatihan *Public Speaking*, pemberian beasiswa Pendidikan, kajian bulanan, dll. Dalam pendanaannya Yayasan FORSIL WMLC ini mengelola dana yang di dapat melalui donatur tetap dan swadaya masyarakat. Dalam 5 tahun terakhir yayasan FORSIL WMLC banyak mengalami peningkatan baik di dalam keanggotaan maupun kegiatan yang telah dilaksanakan. Ini dapat di buktikan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan positif yang telah dilaksanakan oleh Yayasan FORSIL WMLC. Berikut grafik perkembangan jumlah anggota FORSIL WMLC dalam 5 tahun terakhir.



***Grafik 1 tentang perkembangan anggota FORSIL WMLC dalam 5 tahun terakhir.***

Dalam 5 tahun terakhir Yayasan FORSIL WMLC memiliki perkembangan dalam segi keanggotaannya. Berdasarkan data pada grafik 1 dapat diperoleh informasi bahwa jumlah anggota Yayasan FORSIL WMLC dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Dengan jumlah anggota pada; (1) tahun 2020 berjumlah 3200 Kartu Keluarga; (2) tahun 2021 berjumlah 4000 Kartu Keluarga; (3) tahun 2022 berjumlah 4200 Kartu Keluarga; (4) tahun 2023 berjumlah 4200 Kartu Keluarga dan pada tahun 2024 bertambah menjadi 5500 Kartu Keluarga. Dengan angka yang diperoleh diatas menunjukkan bahwa masyarakat Lippo Cikarang memiliki minat ketertarikan terhadap FORSIL WMLC dengan program unggulan, antara lain: fasilitas pemakaman FORSIL, Beasiswa Pendidikan, diskon khusus di merchant mitra FORSIL, dan kajian/workshop/seminar eksklusif non-umum, menjadikan daya tarik bagi masyarakat muslim di Lippo Cikarang untuk bergabung menjadi anggota FORSIL WMLC.

Yayasan termasuk dalam kategori organisasi nonlaba yang tidak mengutamakan kepentingan individual organisasi dalam menghasilkan laba tetapi aktivitas utamanya adalah mengupayakan dalam melakukan pelayanan bagi public (Sianturi & Dwicaksono 2023). Fenomena Yayasan di Indonesia menjadi topik yang menarik. Banyak Yayasan yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam berbagai bidang seperti Pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial. Namun ada kasus dimana Yayasan terlibat dalam penyalahgunaan dananya. Pemerintah menerbitkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Regulasi tersebut terkait langsung untuk lembaga pemerintah dan juga bagi lembaga non-pemerintah yang menjadi bagian dari sektor publik dalam hal ini Yayasan. Yayasan juga memiliki payung hukum dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, dimana prinsip akuntabilitas dan transparansi publik selain kemandirian yayasan sebagai badan hukum dan prinsip nonlaba yang menjadi hal fundamental bagi suatu yayasan karena organisasi nonlaba seperti yayasan berbeda dengan organisasi yang berorientasi pada laba. Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi nonlaba tidak semata-mata digerakkan oleh tujuan untuk mencari laba. Perbedaan karakteristik nonlaba dan bisnis terdapat pada standar laporan keuangannya. Akan tetapi, tujuan organisasi nonlaba dan organisasi bisnis tidak memiliki perbedaan dalam tujuan dan fungsi pembuatan laporan keuangan atau akuntansi (Yanuarisa Yesika, 2020).

Melihat meningkatnya antusias masyarakat terhadap Yayasan FORSIL WMLC. Maka timbul masalah baru yaitu dibutuhkannya transparansi dan pembukuan pendanaan Yayasan FORSIL WMLC. Demi menjaga kredibilitas Yayasan serta kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas menjadi satu nilai penting dalam aktivitas organisasi yang merepresentatifkan seberapa baik kualitas manajemen organisasi dalam melaporkan seluruh aktivitas dengan sefaktual mungkin kepada seluruh pemangku kepentingan. Syariat Islam memberikan ruang terhadap akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi konsep yang mendasari pertanggungjawaban manusia atas aktivitas organisasinya bukan hanya kepada manusia lain namun juga kepada Allah SWT (Pratama, 2022). Dengan adanya akuntabilitas ini Yayasan FORSIL MWLC berupaya untuk selalu memberikan tansparansi dalam pendanaannya yang dengan adanya transparansi dalam akuntabilitas pendanaannya ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta donatur kepada Yayasan FORSIL WMLC.

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang membahas tentang akuntabilitas perencanaan dan pengelolaan dana sebelumnya Baihaqi et al (2019) dengan hasil penelitian bahwa perencanaan dan penganggaran keuangan desa di Kecamatan Giri Mulya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Upadana et al (2019) dengan hasil penelitian bahwa perencanaan keuangan Yayasan widya asih yang telah berjalan dengan baik. Sedangkan menurut Achmad & Misnaini (2021) dengan hasil peneitian bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa telah memenuhi standar akuntansi. Menurut Yanuarisa Yesika (2020) dengan hasil penelitian bahwa

pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Penelitian ini berbeda dari empat penelitian sebelumnya karena menggabungkan Perencanaan dan pengelolaan yang erat. Harapannya dengan penelitian ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terkait kinerja yayasan FORSIL WMLC.

## **2. KERANGKA PIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **2.1 Konsep Akuntabilitas**

Dalam menjalankan organisasi banyak peraturan dan konsep-konsep manajemen yang mendukung terciptanya keteraturan kualitas dari proses pengorganisasian tersebut, salah satunya adalah konsep akuntabilitas. Konsep ini sangat lekat dengan proses pelaporan dan pertanggungjawaban organisasi. Akuntabilitas diidentifikasi sebagai sebuah konsep dalam pengelolaan organisasi untuk memberikan penilaian tentang seberapa baik sebuah organisasi melakukan pelaporan dan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. (Pratama, 2022). Menurut Sitorus D.C dkk (2013) akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Akuntabilitas merupakan istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa, pada intinya akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Caron & Markusen, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa pengurus Yayasan memiliki kewajiban untuk tanggap atas kebutuhan publik ketika diminta pertanggungjawaban atas pengelolaannya. Menurut Budiardjo (2007) menyatakan dalam penyelenggaraan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- A. Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf;

- B. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- C. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran;
- D. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- E. Harus jujur, obyektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Konsep akuntabilitas mulai dikaji secara intensif pada sektor publik seiring dengan berkembangnya konsep mengenai *reinventing government*. Akuntabilitas merupakan konsep yang berbeda dari tanggung jawab (*responsibilitas*). Akuntabilitas lebih merujuk pada relasi organisasi sebagai sebuah entitas dengan pihak di luar organisasi. Artinya, level analisis akuntabilitas adalah pada tingkat makroorganisasi yang menekankan pada aspek sosiologi organisasi dengan fokus interaksi antara organisasi dengan pihak-pihak yang berelasi pada organisasi tersebut. Sedangkan tanggung jawab lebih menekankan pada level individual sebagai keharusan anggota di dalam suatu organisasi publik untuk menunjukkan perilaku yang sejalan dengan standar etika yang telah ditetapkan sebagai aturan dan melaksanakan pekerjaan dengan benar sesuai dengan arahan dan pelatihan yang telah diterimanya. (Wicaksono, 2015)

## **2.2 Konsep Perencanaan**

Perencanaan dan pengendalian keuangan sangat penting dilakukan untuk mengawal keberlangsungan organisasi yang baik. Penganggaran atau penyusunan anggaran (*budgeting*) adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi (*strategic planning*), penyusunan program (*programming*), dan penyusunan anggaran (*budgeting*) (Mahsun, 2019). Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perencanaan berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi 3, yaitu

- A. Perencanaan jangka Panjang
- B. Perencanaan jangka menengah
- C. Perencanaan jangka pendek

Yayasaan sebagai suatu organisasi non profit, mengarahkan proses perencanaan dan sumber daya yang tersedia untuk memaksimalkan manfaat yang akan diperoleh . sumber daya utama yang diperlukan untuk perencanaan adalah waktu pengelola, waktu Pembina, dan uang.

Penganggaran (budgeting) merupakan proses menyusun anggaran sehingga anggaran (budget) adalah hasil (bagian) dari penganggaran. Penganggaran digunakan baik oleh perusahaan maupun nonperusahaan. Penganggaran untuk nonperusahaan disebut dengan penganggaran nirlaba (nonprofit budgeting), yaitu penganggaran untuk organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Sedangkan penganggaran untuk perusahaan merupakan penganggaran organisasi yang bertujuan untuk mencari laba. (Eka Putra). Menurut Indra Bastian (2019), berdasarkan *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA) yang saat ini telah diubah menjadi *Goverssssmental Accounting Standards Board* (GASB), definisi anggaran (budget) adalah “...rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”.

Menurut Sri Rahayu dan Andry Arifian Rachman (2013) Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya”. Sedangkan menurut M. Nafarin (2012:19) pengertian anggaran adalah “...rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang”

### 3. METODE

Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif jenis deksriptif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata dan kekinian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi.

Sumber data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah, data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama (sumber asli tanpa melalui perantara), baik dari individu atau kelompok , dan didapat dari hasil wawancara atau pengisian kuisioner oleh

responden. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objek penelitiannya. Data sekunder mengacu kepada upaya peneliti untuk mengumpulkan sejumlah data dari sumber primer. Data sekunder banyak digunakan untuk penelitian dengan tujuan mengetahui perspektif alternatif dari pertanyaan riset yang telah dilakukan sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, situs, maupun dokumen-dokumen lainnya. data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis.

Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah Observasi yaitu kegiatan mengamati, yang diikuti pencatatan secara urut. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti. observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan penginderaan.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara (Interview) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.

Studi kepustakaan adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Laporan Pencatatan Keuangan Yayasan FORSIL WMLC**

Pada sistem pengelolaan keuangannya Yayasan Forum Silaturahmi Warga Muslim Lippo Cikarang menerima dana melalui swadaya masyarakat dan donatur tetap berupa infak. Dimana jumlah pemasukannya tentu tidak sama setiap harinya. Untuk memudahkan sistem yang dilakukan terkait infak Yayasan FORSIL WMLC menggunakan beberapa metode pembayaran berupa QRIS, dan transfer. Yang nantinya setiap dana yang masuk ke Yayasan FORSIL WMLC akan digunakan untuk pemeliharaan fasilitas dan pelaksanaan program rutin FORSIL WMLC, yang akan dilaporkan secara rutin kepada masyarakat serta donatur yang telah berkontribusi.

### **4.2 Akuntabilitas di Yayasan FORSIL WMLC dalam pengelolaan pendanaannya**

Akuntabilitas merupakan istilah yang diterapkan untuk mengukur dana publik yang telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tersebut ditetapkan dan tidak digunakan

secara ilegal. Dalam akuntabilitas pendanaannya Yayasan Forum Silaturahmi Warga Muslim Lippo Cikarang (FORSIL WMLC) memberikan transparansi akuntabilitas pendanaannya dengan cara melaporkan keluar masuknya dana secara terbuka yang dapat diakses melalui website resmi FORSIL WMLC, dan memberikan laporan keuangan serta operasional kepada para donatur. Berdasarkan observasi awal dengan Ketua Yayasan FORSIL WMLC Bapak Ade Aan Wirama mengatakan bahwa Yayasan FORSIL WMLC masih menggunakan system akuntansi dasar pada pelaporan keuangannya yaitu dengan memberikan data berupa keluar masuknya uang.

## 5. KESIMPULAN

Yayasan Forum Silaturahmi Warga Muslim Lippo Cikarang (FORSIL WMLC) adalah sebuah badan hukum non-profit berbasis keagamaan, khusus muslim, yang bertujuan untuk memperkuat *ukhuwah Islamiyah* antar warga muslim di kawasan Lippo Cikarang dan memberikan manfaat terbaik bagi warga muslim. Pada sistem pengelolaan keuangannya Yayasan FORSIL WMLC menerima dana dari swadaya masyarakat dan kontribusi donatur tetap. Untuk mempermudah pengelolaan dana nya Yayasan FORSIL WMLC memberikan beberapa metode pembayaran berupa QRIS dan transfer bank. Secara umum Yayasan FORSIL WMLC masih menerapkan sistem akuntansi sederhana. Dengan memberikan laporan keuangan berupa keluar dan masuknya keuangan saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, & Misnaini. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Duwet Panarukan Situbondo. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 45–58. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i2.45-58>
- Anwar Muhammad Chairul. (2021). *Mengenal Apa Itu Yayasan: Pengertian, Dasar Hukum, dan Ciri-ciri*. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2021/11/07/091453426/mengenal-apa-itu-yayasan-pengertian-dasar-hukum-dan-ciri-ciri>
- Baihaqi, B., Sari, R. P., & Asmawanti S, D. (2019). PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 61–76. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.61-76>
- Caron, J., & Markusen, J. R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 1–23.

- Kuliah, M., Dosen Pengampu, P., Eka Putra, W., & Jambi, U. (n.d.). *KONSEP DASAR PENGANGGARAN Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Mahsun, M. (2019). Konsep Dasar Penganggaran. *Penganggaran Sektor Publik*, 256. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/ekap4403-penganggaran-sektor-publik/#tab-id-3>
- Nandy. (2021). *Pengertian Yayasan: Ciri-ciri, Tujuan, dan Cara Mendirikannya*. Gramedia. [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-yayasan/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-yayasan/#google_vignette)
- Pratama, B. B. (2022). Akuntabilitas Organisasi Nirlaba: Analisis dalam Metafora Empat Sifat Rasul. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 20(1), 143. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v20i1.12399>
- Robi Krisna. (2021). Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 41–47. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/123>
- Sianturi, F. A. E., & Dwicaksono, A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas Good Governance Terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 6(1), 38–59. <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.205>
- Sitorus D.C dkk. (2013). *PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI YAYASAN DALAM RANGKA MENCEGAH PRAKTIK PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)* Dwi Cesaria Sitorus \*) Bismar Nasution \*\*) Windha \*\*\*). I, 1–7.
- Upadana, I. W. Y. A. U., Sanjaya, D. S., Nugraha, K. N. N., Aditya, N. B. S. A., & Wiratama, A. A. W. (2019). Akuntansi Sektor Publik Perencanaan Dan Pengeloan Dana Yayasan Widya Asih. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(3). <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i3.20029>
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- Yanuarisa Yesika. (2020). Balance : Vol. 12 No. 2 Juli 2020. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan*, 12(2).